



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

---

<b>Judul</b>	: Pemerintah-DPR Bersepakat 10 RUU Masuk Prolegnas 2016
<b>Tanggal</b>	: Selasa, 07 Juni 2016
<b>Surat Kabar</b>	: Suara Pembaruan
<b>Halaman</b>	: 5

[JAKARTA] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengapresiasi kinerja DPR yang telah menetapkan lima rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi UU. "Pemerintah sepakat perlu ada perubahan Prolegnas dengan memperbaiki isi dan kualitas," kata Yasonna, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7). Lima RUU yang diajukan pemerintah dan disetujui DPR, meliputi RUU tentang Bea Materai, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Narkotika, dan Palang Merah. Yasonna menjelaskan, alasan RUU Bea Materai penting masuk Prolegnas karena UU yang lama tidak sesuai dengan zaman dan perkembangan ekonomi. "Sehingga memperlambat target penerimaan negara dari sektor pajak," ucapnya. Nantinya Bea Materai akan disesuaikan dengan tingkat inflasi. RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperlukan karena tantangan BPK yang semakin berat dan ekspektasi dari masyarakat yang semakin tinggi. Menurut Yasonna, UU yang lama tidak kurang tegas mengenai penerapan prinsip kolektif kolegial. "Terutama mekanisme check and balanced di tingkat BPK," tuturnya. Adapun, RUU Mahkamah Konstitusi (MK) diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan batas waktu penyelesaian sengketa pilkada. Sedangkan RUU Narkotika, kata Yasonna, akan memperjelas definisi pecandu, penyalahgunaan, dan korban narkoba. Selain itu, RUU Narkotika diperlukan karena sanksi penjara tidak efektif dan malah membuat penjara over kapasitas. "Model penanganan korban harus dibedakan kapan harus dipenjara atau direhab," ujar Yasonna. Sedangkan RUU Palang Merah, menurut Yasonna, dulu sudah hampir selesai, bahkan sudah studi banding. "Hanya tinggal sedikit saja," katanya. Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki urgensi karena melihat kondisi dan perkembangan yang ada. Sehingga gadibutuhkan undang-undang lex specialis terkait kekerasan seksual. Rieke mengemukakan, dirinya mengapresiasi upaya pemerintah yang mengeluarkan Perppu yang merupakan upaya perbaikan terhadap substansi UU Perlindungan Anak, seperti yang disampaikan oleh Menkumham. Namun, demikian fakta di lapangan, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak, bahkan hanya terjadi terhadap perempuan. "Dengan demikian dibutuhkan suatu UU yang dapat mendefinisikan kekerasan seksual lebih luas, penanganan yang lebih konprehensif baik bagi korban, maupun pelaku, termasuk bagi keluarga," kata Rieke Diah Pitaloka. Rieke mengatakan, di dalam rapat tersebut, Yasonna menyatakan, Pemerintah dapat memahami, sepakat dan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 dengan pemrakarsa adalah DPR. Aparatur Sipil Negara Terkait RUU Perubahan atas UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Rieke mengatakan bahwa hal itu penting untuk merubah ketentuan lama. Yakni terkait indikasi tiadanya pengaturan yang jelas dan tegas terhadap Aparat Sipil Negara (ASN) yang berstatus kontrak dan honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. "Sehingga proses perekrutan yang sekarang sedang dilakukan pun tanpa ada kejelasan payung hukum, termasuk hak untuk memperoleh 5 jaminan sosial bagi Aparat Sipil Negara sesuai perintah UU JSN dan BPJS," katanya. Di dalam rapat, Yassona menyatakan bahwa Pemerintah sedang menyiapkan RPP turunan ASN. Namun, jika DPR menghendaki ada perubahan UU, Pemerintah menerima usulan tersebut. "Dengan demikian dua RUU di atas diterima dan telah disepakati menjadi Prolegnas Prioritas 2016," kata Rieke, politikus PDI-P itu. Pimpinan sidang Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, mengatakan substansi RUU Palang Merah tidak banyak berubah, kendalanya tinggal satu yaitu masalah simbol. "Asal PKS setuju, jadi ini barang," kata politikus Golkar ini. Selain usulan RUU dari pemerintah, DPR menambahkan pula 5 RUU lainnya, yaitu RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Perkelapa Sawit, RUU Bank Indonesia, dan RUU Otoritas Jasa Keuangan. "Rapat kerja Baleg dan KemenkumHAM menyepakati sepuluh RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2016, apakah dapat disetujui?" kata Firman. "Setuju," jawab peserta rapat. Firman menambahkan, perubahan Prolegnas ini segera dibawa dalam sidang paripurna untuk diolah dan dalam waktu dekat. [MJS/H-14]